

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP LABA PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA KANTOR CABANG JAYAPURA

Eko Yuni Harnanto, Mursalam Salim

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Yapris Papua
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 11 DokV Atas, Jayapura Papua, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan Pemerintah tentang kredit usaha rakyat (KUR) terhadap laba Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Kantor Cabang Jayapura. Rumusan masalah penelitian adalah apakah kebijakan pemerintah tentang Kredit usaha rakyat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Laba Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Kantor Cabang Jayapura. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Kantor Cabang Jayapura, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Kantor Cabang Jayapura secara berturut-turut untuk periode 2010-2012. Hasil analisis dengan menggunakan uji regresi.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kebijakan pemerintah dengan laba Perum Jamkrindo dengan nilai konstanta sebesar -996.501, artinya bahwa jika variabel yang dianalisis adalah nol atau tidak adanya kebijakan penambahan KUR maka laba Perum Jamkrindo akan mengalami penurunan sebesar Rp 996.501,- setiap triwulannya. Hal ini karena yang dijadikan parameter adalah data tiap triwulan sejak Tahun 2010–2012. Namun hasil ini ditandai dengan nilai tidak signifikan dari hasil olah statistik yaitu 0,143, nilainya lebih besar dari pada nilai α (alpha) yang ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak yaitu kebijakan kredit usaha rakyat (X) secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba perusahaan (Y) Perum Jamkrindo Kantor Cabang Jayapura.

Kata Kunci : pengaruh kebijakan kredit usaha rakyat terhadap laba perusahaan.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat, maka pada tanggal 15 November 2007, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Kredit Usaha Rakyat untuk membantu permodalan sektor Usaha Kecil dan Menengah. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disebut KUR adalah kredit modal kerja dan atau kredit investasi yang diberikan oleh Perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang *feasible* maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan tetapi belum bank able atau belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan atau pembiayaan dari Bank pelaksana antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan atau pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana termasuk sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), memiliki usaha produktif yang didukung dengan program penjaminan. Dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat, terdapat 3(tiga) pilar penting yaitu: pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit berikut penjaminan kredit, Lembaga Penjaminan yang bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan, dan Perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKMK. Perum Jamkrindo menunjukkan peningkatan kinerja Perusahaan dibandingkan tahun

sebelumnya. Pada tahun 2010 Perum Jamkrindo mampu memperoleh laba bersih Rp.148,39 miliar atau meningkat 31.09% apabila dibandingkan dengan laba bersih tahun 2009 yaitu sebesar Rp.113,19 miliar. Meningkatnya pendapatan operasional dari IJP dan pendapatan investasi mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi tercapainya peningkatan laba Perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah apakah Kebijakan Pemerintah tentang kredit usaha rakyat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Laba Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Kantor Cabang Jayapura?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah tentang Kredit Usaha Rakyat terhadap Laba Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Kantor Cabang Jayapura.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah menurut Soemendar (dalam Syafie dan Azikin,2007:9) yaitu “Badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, perlu memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan, kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi”. Kebijakan public sebenarnya adalah kontrak antara rakyat dengan penguasa akan hal-hal penting apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, sebuah istilah Jean Rousseau, filsuf social Perancis yang sejaman dengan, *Montesquieuse* bagai *the social contract or principles of political rights*, sebagaimana Rousseau, (dalam Nugroho 2003 : 59) menyatakan bahwa “Kebijakan public adalah kontrak social itu sendiri”.

Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size. Pertumbuhan perusahaan pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu factor eksternal, internal, dan pengaruh iklim industri lokal. Pengertian *Profit Margin* menurut Bambang Riyanto (2001:37): "*Profit margin* yaitu perbandingan antara *net operating income* dengan *netsales*". Sedangkan pengertian *Profit Margin* menurut S.Munawir (2004:89): "*Profit margin* ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya" Pendapat yang sama dikemukakan Husein Umar (2005:216): "Margin Laba Usaha mencerminkan kemampuan Manajemen untuk menghasilkan laba setelah beban operasi/usaha dan harga pokok penjualan dalam hubungannya dengan penjualan yang dilakukan".Demikian juga menurut Sofyan Syafrri Harahap (2001:304): "Angka ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi".

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kebijakan Pemerintah tentang kredit usaha rakyat yang akan berpengaruh memberikan dampak positif terhadap laba Perum Jamkrindo.

HIPOTESIS

Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian adalah: Kebijakan Pemerintah tentang Kredit Usaha Rakyat mempunyai pengaruh terhadap Laba Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Jayapura.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Kantor Cabang Jayapura, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Kantor Cabang Jayapura secara berturut-turut untuk periode 2010-2012.

Model uji regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + e$$

Dimana:

Y = laba perusahaan,

A = konstanta,

b_1 = koefisien regresi,

X_1 = kebijakan pemerintah tentang kredit usaha rakyat, dan

e = variable gangguan.

HASIL PENELITIAN

Hasil analisis uji regresi untuk mengetahui pengaruh variable $Y =$ Volume Kredit, $X =$ Laba Perusahaan dengan menggunakan program SPSS *for windows* versi 17 menunjukkan persamaan uji regresi adalah $Y = -996.501 + 0.449X$. Persamaan tersebut diatas dapat diartikan bahwa dengan nilai konstanta sebesar -996.501 menunjukkan bahwa tanpa adanya kebijakan pemerintah, maka pendapatan laba Perum Jamkrindo adalah -996.501, sedangkan arah hubungan menggambarkan hubungan yang positif, atau dalam hal ini peningkatan kebijakan pemerintah dengan volume kredit yang disalurkan akan meningkatkan Perum Jamkrindo, sedangkan koefisien regresi sebesar 0.449 menunjukkan bahwa kenaikan volume kredit sebesar 1 kali akan meningkatkan kinerja sebesar 0.449 kali atau sebesar 44,9%. Namun dari hasil uji statistic yang diperoleh menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah tentang Kredit Usaha Rakyat tidak signifikan terhadap Laba Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Jayapura.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kebijakan Pemerintah tentang kredit usaha rakyat tidak signifikan terhadap laba Perum Jamkrindo Kantor Cabang Jayapura karena nilai signifikansi yang ditunjukkan 0,143 lebih besar dari nilai alpha yang dipersyaratkan 0,05. Hal ini menunjukkan kontribusi kebijakan kredit usaha rakyat terhadap laba perusahaan masih relatif kecil, dikarenakan ada factor lain yang mempengaruhi laba perusahaan.

SARAN

Dengan adanya kesimpulan seperti telah diuraikan tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan pemberian tambahan atau peningkatan besarnya volume KUR agar dapat meningkatkan pendapatan Perum Jamkrindo.
2. Rendahnya nilai koefisien determinasi tersebut perlu mendapat perhatian serius, yakni dengan penerapan efisiensi beban usaha sehingga dapat menambah laba Perum Jamkrindo.
3. Perlunya peningkatan sumber daya manusia baik pendidikan secara formal atau informal yang dapat meningkatkan pengetahuan karyawan, dengan demikian akan dapat mendukung kemajuan usaha Perum Jamkrindo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Agus Sartono, 2001. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPEF-YOGYAKARTA.
- Antonio, M. Syafei, 2003, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta
- Bank Indonesia, 1997. *Tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Jakarta.
- Baridwan, Zaki, 1997. *Intermediate Accounting*, Edisi Tujuh, BPFE, Yogyakarta
- Bambang Riyanto, 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh, BPFE, Yogyakarta.
- Belkoui, Ahmed Riahi, 2006. *Teori Akuntansi*, Buku I, Edisi kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjahmada University Press. Erlina, 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama.
- U.S. Financial Accounting Standards Board, 1992, *Statement of Financial Accounting Concepts (SAFC) No. 1*
- Fraser Lyn, M., Ormiston Alien. 2004. *Memahami Laporan Keuangan*. Edisi Keenam. PT. Indeks. Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi II*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Helfer, Erich, A. 1991. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Ketujuh, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Hendriksen, Eldon S. dan Michael F. Van Breda. 2000. *Accounting Theory*. Fifth Edition. Southern Methodist University.
- Husein Umar, 2005. *“Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”*. Edisi Baru-7. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua. Jayapura.
- Kieso, Donald E dan Jerry J. Weygant. 2002. *Akuntansi Intermediate*, Jilid I Edisi Kesepuluh. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Metode Kuantitatif*, Edisi Kedua. UPP. AMP. YKPN, Yogyakarta.
- Munawir, S., Akuntan, 2004. *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi ke Empat, Yogyakarta: Liberty.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP. AMP. YKPN, Yogyakarta. Ndraha,
- Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid I. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nugroho, Riant. D. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (SOP.KUR) 2011*. Tim Pelaksana Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Eresco.

Syafiie, Inu K. dan Azikin, Andi. 2007. *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama

Sofyan Syafri Harahap, 2001. "Analitis Kritis Atas Laporan Keuangan". Cetakan Ketiga. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedi